

PERAN MEDIA CETAK DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA AMBON

THE ROLE OF MASS MEDIA IN LEADING PUBLIC POLICY IN AMBON

Said Lestahu

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pattimura

Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon-Maluku Indonesia

e-mail : idenlesta@gmail.com

(Diterima: 16 Februari 2015 ; Direvisi: 2 April 2015; Disetujui terbit: 2 April 2015)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana peran media cetak dalam mengawal kebijakan publik di Kota Ambon. Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dengan pertimbangan bahwa Kota Ambon merupakan pusat pemerintahan serta sebagai pusat dimana banyak media cetak melakukan aktivitasnya. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang bersifat terbuka dan terstruktur terhadap sejumlah informan, serta akan menjadi instrumen utama dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media cetak dalam mengawal kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan dengan baik sehingga memberikan dampak terhadap perubahan sosial masyarakat dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Namun dalam pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kontrol terlihat bahwa media cetak belum mampu secara maksimal melakukan peliputan yang berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik. Itu berarti bahwa selama ini pers masih terbatas hanya dalam melakukan fungsi informasi saja tanpa ditindaklanjuti dengan tindakan investigatif. Selain itu, dalam melakukan pemberitaan selama ini, pers belum dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap lembaga-lembaga publik dalam pengambilan keputusan terkait dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan baik secara perorangan ataupun secara institusi.

Kata kunci : media massa, pers, kebijakan publik.

Abstract

This study was conducted in order to determine to what extent the role of print media in guarding public policy at Ambon City, with the consideration that Ambon City was the administrative center as well as a center where a lot of print media done their activities. This study used a qualitative descriptive analysis, using interview techniques based on the interview guidelines that were opened and structured on a number of informants, and would be the main instrument in the data analysis. The results showed that print media's role in guarding the public policy conducted by the government has been doing well, making an impact on social change in education and the environment. However, the approach relating to the implementation of the control function was seen that the print media has not been able to optimally in providing coverage related to various forms of violations committed by public institutions. That meant that during the press was limited only to perform the functions of information without investigative actions. Moreover, in doing during this reporting, the press has not been able to give a significant impact on public institutions in decision-making related to various offenses committed either individually or in institutions.

Keywords : mass media, press, public policy.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia selalu ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan

ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu melakukan interaksi dengan berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah

berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu Everett Kleinjan (2003) dari *East West Center Hawaii* mengemukakan bahwa :“Komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup maka ia perlu berkomunikasi”. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Wilbur Schramm menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Teori dasar biologi menyebut adanya dua kebutuhan yang mendorong manusia sehingga ingin berkomunikasi dengan manusia lainnya, yakni kabutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Harold. D. Lasswell (2003), salah seorang peletak dasar ilmu komunikasi lewat ilmu politik menyebut tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab mengapa manusia perlu berkomunikasi yang antara lain sebagai berikut :

1. Hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui peluang-peluang yang ada, mengetahui peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Adanya upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi warisan sosial. Suatu masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakatnya dituntut untuk malakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peranan.

Ketiga fungsi di atas menjadi patokan dasar bagi setiap individu dalam berhubungan dengan sesama anggota masyarakat. David K. Berlo (2003) menyebutkan secara ringkas bahwa komunikasi secara instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain dan juga mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat.

Harus diakui, bahwa tidak semua orang siap berdemokrasi. Dasar pemikiran kegiatan anggota masyarakat dalam proses memerintah diri sendiri adalah agar demokrasi menjadi satu kenyataan dan bukan slogan biasa. Bila masyarakat tidak menyadari dan tidak menjalankan “spirit” demokrasi, maka masyarakat demokratis dan “*free society*” tidak akan pernah terwujud. Terkait dengan itu maka keberadaan pers menjadi sangat penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Hal ini nampak dari fungsi pendidikan yang harus dibebankan pada pers sebagai medium yang dapat menggapai sebanyak mungkin orang. Fungsi pers lainnya adalah fungsi kontrol sosial yang mempunyai aspek yang amat luas, salah satunya adalah sebagai anjing penjaga (*watchdog*) yang mungkin sering disalahartikan. Selama ini, seakan-akan pers berada dalam posisi saling berhadapan atau berkonfrontasi dengan pemerintah. Sebagai *watchdog*, pers memang berfungsi untuk mengawasi pemerintah, lembaga legislatif, serta yudikatif. Maksudnya

adalah agar segala kebijakan dan aktivitas yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Pers akan memberikan peringatan bila terjadi penyimpangan. Fungsi lain yang harus dilakukan oleh pers adalah fungsi *agenda setting*. Banyak isu yang berkembang di masyarakat dimana dalam kondisi seperti ini pers harus bisa memilih isu mana yang akan ditampilkan dan isu mana yang akan abaikan. Keputusan pers dalam memilih isu ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai isu apa yang dianggap paling penting. Namun di dalam sebuah masyarakat yang demokratis, pers tidak dapat memanipulasi atau mengabaikan isu semau mereka sendiri. Hal ini dikarenakan persaingan di antara media sangat ketat. Selain itu masyarakat juga mempunyai kebebasan untuk menetapkan agenda yang berbeda. Ketidaktepatan sebuah media dalam penentuan agenda akan menyebabkan media yang bersangkutan kehilangan kredibilitas dan ditinggalkan masyarakat. Sedangkan menurut undang-undang pers No. 40 tahun 1999, pers berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Media sudah seharusnya menjadi arena ruang publik terbuka dalam masyarakat pluralis demokratis yang menyediakan saluran komunikasi terbuka yang mampu menampung suara-suara dari golongan minoritas.

Kajian media di dunia barat terdahulu telah mendefinisikan Pers sebagai "Fourth state" atau pilar keempat (Eldrige 1995). Pers sebagai pilar keempat mengacu pada peran media dalam mewujudkan cita-cita demokrasi, berdiri secara independen di tengah institusi

pemerintah, mengawasi aktivitas politik, dan menyediakan ruang publik guna terselenggaranya debat umum. Peran ini berdasarkan atas asumsi kaum liberal yang mengatakan bahwa media berjalan dalam masyarakat yang plural. Masyarakat pluralis tercipta dari berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda dengan berbagai macam kepentingan di dalamnya yang kesemuanya punya hak untuk didengar dalam arena perpolitikan. Pers diharapkan mampu menjaga agar masyarakat atau warga negara tercerahkan tentang isu-isu politik dan diharapkan mampu menjadi "*watch dog*" yang selalu mengawasi segala aktivitas perpolitikan, memperingatkan masyarakat ketika terjadi ketidakberesan dengan aktivitas politik para elit. Peran pers sebagai *fourth state*, sesuai dengan konsep Jurgen Habermas tentang publik *sphere* atau ruang publik dimana warga negara memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi secara aktif dan ikut menciptakan opini publik yang pada gilirannya diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi aktivitas politik untuk menciptakan suasana yang demokratis (Graber 1992). Idealnya, ruang publik mampu berperan sebagai pasar dimana ide-ide bermunculan yang pada gilirannya mampu menyediakan informasi-informasi yang relevan dengan situasi politik sehingga masyarakat menjadi melek politik, misalnya dalam bentuk berita, ide-ide, diskusi-diskusi, debat politik, dan lain-lain. Dahlgren (1995) menggarisbawahi bahwa ketika masyarakat berhadapan dengan sejumlah informasi yang relevan, maka mereka akan merefleksikan, mendiskusikan, dan membentuk opini serta melahirkan sejumlah pandangan yang memadunya dalam memahami keinginan dan aktivitas-aktivitas politis. Pada akhirnya,

pandangan-pandangan tersebut akan diartikulasikan dalam ruang publik sebagai salah satu persiapan atas tindakan-tindakan politis lewat mekanisme yang ada.

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka setelah mengadakan pengamatan awal pada berita dan informasi yang disajikan oleh berbagai media cetak di Kota Ambon, penulis menemukan beberapa fenomena yang sifatnya sangat mempengaruhi eksistensi pers sebagai pilar keempat demokrasi antara lain:

1. Seringkali pers masih dijadikan corong bagi pemerintah dalam melakukan pencitraan.
2. Masih banyaknya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.
3. Masih banyaknya pemberitaan yang bersifat tendensius dan jauh dari substansi persoalan serta tidak berdasarkan data dan fakta.
4. Kurangnya fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Masih rendahnya kualitas pekerja pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Berlandaskan berbagai fenomena di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pers dalam mengawal kebijakan publik di Kota Ambon. Mengacu pada rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pers dalam mengawal kebijakan publik di Kota Ambon. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat terhadap kajian kritis bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu, menjadi bahan referensi khusus bagi peneliti, serta akan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah dalam dunia media cetak yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau bahan rujukan bagi siapapun yang bermaksud mengadakan penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Media massa, khususnya pers pembangunan pada hakikatnya berupaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pers bukan saja menjadi mediator antarpemerintah dengan masyarakat, tetapi sekaligus partner pemerintah dengan agen perubahan dalam segala kompleksitasnya yang berorientasi pada pembangunan nasional. Dalam kerangka itulah perencanaan pembangunan tidak terlepas dari konsep perencanaan komunikasi. Kehadiran media massa dalam konsep komunikasi dan informasi global menghendaki kejelasan dan peranan sehingga misi media massa akan mencapai sasaran yang dituju dan jauh dari spekulasi. Media massa sebagai barometer kehendak masyarakat, dapat menjadi tolak ukur dalam melihat kemajuan pembangunan, meneropong kepincangan birokrasi, dan memberikan alternatif baru yang pada hakikatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari esensi pembaharuan dalam arti luas. Dalam karyanya yang kini tergolong klasik, Schramm (2003) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial pembangunan nasional yaitu:

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan nasional agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan, dan cara membangkitkan aspirasi nasional.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan pada

pimpinan masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, serta menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.

Teori Komunikasi Massa

Pengaruh media masa banyak mengkaji tentang segmen media (suatu program, tipe program, macam isi media tertentu) mempengaruhi individu. Ada beberapa teori yang dapat dijadikan acuan untuk melihat keperkasaan media masa dalam kaitannya dengan aktivitas politik di antaranya:

1. Teori *Agenda Setting*

Agenda-setting diperkenalkan oleh McCombs dan DL Shaw (1972). Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting oleh media maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.

2. Teori Kegunaan dan Kepuasan (*Uses and Gratifications*)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.

3. Teori Jarum Suntik (*Hypodermic Needle Theory*)

Teori ini diangkat setelah melihat keberhasilan penggunaan medium radio dan media cetak sebagai alat propaganda dalam Perang Dunia I. Teori jarum suntik berpendapat bahwa khalayak sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakkan melalui media komunikasi. Khalayak terlena seperti kemasukan obat bius melalui jarum suntik sehingga tidak bisa memiliki alternatif untuk menentukan pilihan lain kecuali apa yang disiarkan oleh media. Teori ini juga dikenal dengan teori peluru (*bullet theory*). Teori ini dikemukakan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1950-an.

Komunikasi Massa Bagi Masyarakat

Para pakar mengemukakan tentang sejumlah fungsi komunikasi, kendati dalam setiap item fungsi terdapat persamaan dan perbedaan. Pembahasan fungsi komunikasi telah menjadi diskusi yang cukup penting, terutama konsekuensi komunikasi melalui media massa. Fungsi komunikasi massa bagi masyarakat menurut Dominick (2001) adalah:

a. Pengawasan

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam dua bagian: *Pertama* fungsi pengawasan peringatan, terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung merapi, dan lain sebagainya. *Kedua* pengawasan instrumental yaitu penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari.

b. Penafsiran

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau

industri media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan.

c. **Pertalian**

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk *linkage* (pertalian) berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

d. **Penyebaran Nilai-Nilai**

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara dan juga disebut sosialisasi. Sosialisasi mengacu kepada cara dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok.

Efek Komunikasi Massa

Komunikasi massa merupakan sejenis kekuatan sosial yang dapat menggerakkan proses sosial ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi untuk mengetahui secara tepat dan rinci mengenai kekuatan sosial yang dimiliki oleh komunikasi massa dan hasil yang dapat dicapainya dalam menggerakkan proses sosial tidaklah mudah. Oleh karena itu, efek atau hasil yang dapat dicapai oleh komunikasi yang dilaksanakan melalui berbagai media perlu dikaji melalui metode tertentu yang bersifat analisis psikologis dan analisis sosial. Yang dimaksud dengan analisis psikologi adalah kekuatan sosial yang merupakan hasil kerja dan berkaitan dengan watak serta kodrat manusia. Sedangkan analisis sosial adalah peristiwa sosial yang terjadi akibat komunikasi massa dengan penggunaan media massa yang sangat unik dan kompleks. Donald K. Robert (1999) mengungkapkan ada yang beranggapan bahwa “Efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa”. Oleh karena fokusnya pesan maka efek harus berkaitan

dengan pesan yang disampaikan media massa. Lebih lanjut, menurut Steven M. Chaffee (1999) efek media massa dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah efek dari media massa yang berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri. Pendekatan kedua adalah dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa yang berupa perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau dengan istilah lain dikenal sebagai perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. Pendekatan ketiga yaitu observasi terhadap khalayak yang dikenai efek komunikasi massa (Karlinah 1999).

Teori Pers

a. **Teori Pers Otoriter**

Teori otoriter merupakan teori yang paling tua, sejalan dengan terbentuknya pemerintahan negara yang bersifat otoriter pada abad 16 dan 17 di Inggris, kemudian meluas dan diterapkan ke seluruh dunia. Pada masa ini, pemerintahan pada umumnya berbentuk kerajaan yang bersifat absolut karena falsafah yang dianutnya adalah falsafah kekuasaan mutlak dari kerajaan atau pemerintahan. Menurut teori ini, media massa mempunyai tujuan utama mendukung dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk mengabdikan kepada negara. Tidak semua orang dapat menggunakan media komunikasi kecuali mereka yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah. Dengan demikian media massa dikontrol oleh pemerintah karena hanya dapat terbit dengan izin pemerintah, atas bimbingan dan arahan pemerintah, bahkan kadang-kadang dengan sensor pemerintah. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh media massa adalah melakukan kritik terhadap mekanisme

pemerintahan dan kritik terhadap pejabat yang sedang berkuasa. Pemilik media massa bisa pihak swasta yang mendapat izin khusus dari raja atau pemerintah atau milik negara (Karlinah 1999). Sistem media massa seperti ini karena teori otoriter berasal dari falsafah absolut yang memiliki empat asumsi dasar yakni bahwa:

1. Manusia tidak dapat berdiri sendiri dan harus hidup dalam masyarakat. Manusia juga akan menjadi “berarti” kalau dia hidup dalam kelompok.
2. Kelompok lebih penting dari individu. Masyarakat tercermin dalam organisasi-organisasi, dan yang terpenting adalah negara. Negara merupakan tujuan akhir dari proses organisasi.
3. Negara adalah pusat segala kegiatan, individu tidak penting.
4. Pengetahuan dan kebenaran dicapai melalui interaksi individu. Interaksi itu harus terkontrol dan terarah, sehingga kepentingan akhir tidak dirugikan (Karlinah 1999).

Atas dasar keempat asumsi tersebut maka teori ini cenderung membentuk suatu sistem kontrol yang efektif dan menggunakan media massa sebagai sarana yang efektif bagi kebijaksanaan pemerintah meskipun tidak harus dimiliki oleh pemerintah.

b. Teori Libertarian

Asumsi dasar teori libertarian adalah bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalanya. Manusia mempunyai hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Dalam hubungannya dengan kebebasan pers (media massa), teori libertarian beranggapan bahwa pers harus

mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Manusia memerlukan kebebasan untuk memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya secara efektif ketika diterima melalui media. Tujuan dan fungsi media massa menurut paham liberalisme adalah memberi penerangan, menghibur, menjual, namun yang utama adalah menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah serta untuk mengecek atau mengontrol pemerintah. Media dilarang menyiarkan pencemaran nama baik atau penghinaan, menampilkan pornografi, tidak sopan, dan melawan pemerintah. Bila dilanggar, maka akan diproses melalui pengadilan.

c. Teori Tanggung Jawab Sosial

Dasar pemikiran teori adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut para penulis pada waktu itu, kebebasan yang telah dinikmati oleh pers Amerika Serikat harus diadakan pembatasan atas dasar moral dan etika. Media massa harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Teori ini sering dianggap sebagai suatu bentuk revisi terhadap teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang. Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya dalam menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Media massa dilarang mengemukakan tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat.

d. Teori Soviet

Sesuai dengan namanya, teori ini lahir di Uni Soviet, kemudian berkembang di negara-negara komunis Eropa Timur. Dalam beberapa hal sama dengan yang diperbuat oleh Hitler dengan Nazi-nya dan fasisme di Itali di bawah kepemimpinan Benito Mussolini. Teori Pers Soviet Totalitarian disebut juga sebagai Teori Soviet Komunis (*Soviet Communist*). Falsafah yang mendasarinya adalah ajaran *Marxisme, Leninisme, Stalinisme*, dan pembauran pikiran-pikiran Hegel dengan cara berpikir Rusia abad 19. Tujuan utama teori ini adalah untuk membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialis Soviet, khususnya kelangsungan diktator partai. Dalam hal ini, media massa merupakan alat pemerintah (partai) dan merupakan bagian integral dari negara. Ini berarti bahwa media massa harus tunduk kepada pemerintah dan dikontrol di bawah pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Media massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan-tujuan partai serta kebijakan partai. Karena media massa sepenuhnya menjadi milik pemerintah maka yang berhak menggunakannya pun adalah para anggota partai yang setia dan ortodokas.

Pers Sebagai Ruang Publik

Ruang publik tidak merupakan ruang fisik, tetapi suatu ruang sosial yang diproduksi oleh tindakan komunikatif (Sastraprteja 2010). Ruang publik dalam pers itu adalah ruang perjumpaan ide, gagasan, kepentingan, hasrat yang pengantarannya adalah media fisik seperti televisi atau koran. Anda dan saya bisa datang, duduk, berhadap-hadapan secara fisik, tetapi ketika anda dan saya tidak mengeluarkan gagasan, ide dalam komunikasi, di sana tidak ada ruang

publik. Disana hanya ada dua ongkok tubuh yang pasif. Namun sangat berbeda ketika kedua tubuh itu mulai berbicara dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian kehidupan sosial berarti terselenggaranya interaksi baik kelompok maupun kelompok dalam group yang lebih besar dalam ranah dialogal. Pola interaksi tersebut melibatkan pemakaian simbol, tanda, dan ideologi. Yang berkomunikasi bukanlah fisiknya tetapi gagasan-gagasan yang dikomunikasikan.

Ruang publik pers ini hidup dalam saluran-saluran komunikasi pada seluruh komponen, kelas, keragaman kultur, kegemaran, bahkan imajinasi dari komponen-komponen yang beraneka ragam dalam ruang publik tersebut. Seperti dikatakan oleh Sastraprteja (2010) bahwa ruang publik tidak merupakan ruang fisik, tetapi suatu ruang sosial yang diproduksi oleh tindakan komunikatif. Sastraprteja melanjutkan bahwa ruang publik juga bukan suatu institusi atau organisasi politik, tetapi suatu ruang tempat warga negara terlibat dalam deliberasi dialogal mengenai isu publik, juga bukan institusi pengambilan keputusan, bukan pula suatu pertemuan publik dengan agenda tertentu, tetapi suatu arena tempat dilakukan pembicaraan yang “tak tertarik secara institusional”. Dalam pikiran Sastraprteja terdapat beberapa komponen yang diutarakannya seperti kehadiran kehidupan sosial, komunikasi, deliberasi dialogal, dan pembicaraan dimana dialog tersebut adalah dialog hati nurani. Gladstone, seperti dikutip oleh Herry Priyono (2010), menulis tentang ruang publik bahwa “Ruang publik adalah rana hati nurani”. Dalam pers, unsur-unsur ini merupakan komponen yang turut menjadi bagiannya. Ia merupakan rohnya pers bahkan untuk komponen itulah pers tercipta. Disana

dapat kita lihat kehidupan sosial dimana interaksi antarberbagai macam ide dan gagasan sebagai ungkapan hati nurani dari berbagai macam *culture* baik vertikal maupun horizontal hadir. Komunikasi adalah hal yang esensial dalam pers. Sang pembuat opini mengomunikasikan opininya dan mendapat respon dialogis, misalnya diskusi interaktif yang diadakan oleh media, memungkinkan terjadinya dialog dua arah yang akhirnya bermuara dalam pembuatan-pembuatan kebijakan. Input-input dari warga berupa pelayanan birokratis yang kurang memuaskan, keinginan untuk membangun jalan-jalan yang rusak dapat langsung dikomunikasikan untuk diproses dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Bahkan pers menyediakan ruang-ruang ekspresi dari kalangan akar rumput untuk menyuarakan hak dan pergumulan hidup mereka, kekecewaan, atau perasaan sakit hati karena perlakuan yang tidak adil dari sesama sebagai anggota ruang publik, dapat kita jumpai dalam pers. Surat pembaca, misalnya menjadi media penyampaian keluhan, apresiasi, aspirasi dari warga yang didialogkan kepada seseorang atau badan tertentu untuk mendapatkan perhatian. Beberapa surat pembaca justru mendapatkan respon balik yang menjelaskan, mengkritik balik, atau meminta maaf atas tindakan-tindakannya. Dalam opini dapat ditemui himbauan, kritik, saran, nasehat dari warga untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Kebebasan ekspresif warga dalam opini menunjukkan esensi praktis dari ruang publik dimana tidak ada tekanan atau ketakutan, bahkan opini membawa wacana baru, pola pikir baru dalam kehidupan bersama sebagai bagian dari warga yang be-ruang publik. Dalam acara-acara radio, televisi memiliki program-program diskusi

publik. Menghadirkan pemegang kekuasaan sebagai narasumber yang diikuti oleh para oposan serta warga. Diskusi tersebut telah berkontribusi banyak pada tersalurkannya aspirasi warga ruang publik kepada simpul-simpul pembuat keputusan. Bahkan kritik-kritik yang tajam justru dilontarkan dalam forum-forum ini. Kebijakan-kebijakan yang pro pada kepentingan umum diputuskan ketika kritik-kritik kepada penguasa dilontarkan secara bebas. Kasus-kasus tenaga kerja yang teraniaya di luar negeri, kasus plesiran ke luar negeri dapat ditanggulangi dengan lebih baik, semua ini tidak terlepas dari desakan warga melalui perantaran media. Warga menuntut baik kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk bertindak secara cepat serta efisien sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak sosial yang telah tertulis dalam konstitusi. Kebaikan-kebaikan yang sudah lebih baik bagi birokrasi kita tidak terlepas dari peran-peran pers dalam mengawasi, perjalanan penyelenggaraan kehidupan publik. Ruang publik merupakan kekuatan pewacanaan arah kehidupan publik. Kehidupan publik yang lebih baik tidak terlepas dari peran yang besar dari ruang publik ini. Kecenderungan untuk menikmati kebaikan publik dan hidup dalam ketenteraman bersama mendorong ruang ini terus menerus hidup dan terpelihara. Manusia hidup secara sosial (*social animal*), mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sesamanya baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, karena itu gesekan-gesekan kepentingan akan terus hadir bersamanya. Ruang publik ini memungkinkan gesekan itu tidak terjelma dalam respon fisik untuk saling meniadakan akan tetapi dialog dan komunikasi memungkinkan kehidupan bersama dalam harmoni.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dengan pertimbangan bahwa Kota Ambon merupakan pusat pemerintahan serta sebagai pusat dimana pers melakukan aktivitas bisnis dalam wilayah Provinsi Maluku. Metode penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang bersifat terbuka dan terstruktur terhadap sejumlah informan, serta akan menjadi instrumen utama dalam analisis data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap sejumlah informasi yang disajikan oleh media cetak di Kota Ambon dan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap sejumlah informan guna mendapatkan informasi secara akurat yang berkaitan dengan masalah publik. Dalam menentukan seorang informan, maka pertimbangan yang digunakan adalah kapasitas dan kompetensi dari informan yang betul memahami tentang isu/wacana yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam berbagai pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Anggota Dewan Pembaca, Akademisi, dan Aktivis LSM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai pusat pemerintahan dalam wilayah Provinsi Maluku, Kota Ambon memiliki beberapa sarana komunikasi yang sangat penting bagi masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi yang terkait dengan kebutuhannya. Sarana-sarana tersebut antara lain satu siaran radio (RRI) dan satu siaran televisi pemerintah

(TVRI). Selain itu, terdapat pula beberapa stasiun radio dan televisi swasta lokal. Berbagai siaran televisi swasta nasional (RCTI, SCTV, AN-TV, Indosiar, Trans 7, Trans TV, Metro TV) juga dapat dinikmati melalui jasa pelayanan TV kabel maupun melalui parabola. Berbagai media cetak pun kini hadir, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi-informasi tertulis. Sedikitnya terdapat sepuluh media cetak lokal yang tersebar dan berpusat di Kota Ambon. Dua diantaranya memiliki oplag yang paling besar dan memiliki langganan koran yang paling banyak yaitu *Harian Pagi Ambon Ekspres* dan *Harian Pagi Siwalima*. Baik media cetak dan elektronik yang telah disebutkan diharapkan mampu memainkan peran sebagai kekuatan pers dalam rangka menginformasikan serta melakukan sosial-kontrol terhadap berbagai kebijakan publik di Kota Ambon. Untuk menjawab permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran pers dalam mengawal kebijakan publik di Kota Ambon”, berikut akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan.

Peran Pers Dalam Menyampaikan Informasi

Peran media massa cetak sangat penting terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan informasi publik. Dalam melakukan kegiatan pemberitaan, faktor data dan fakta menjadi sangat penting. Beberapa hal atau prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui pekerja media dalam menulis berita yaitu 1) Kejujuran: apa yang dimuat dalam berita harus merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Wartawan tidak boleh memasukkan fiksi ke dalam berita, 2) Kecermatan: berita harus benar-benar seperti kenyataannya dan ditulis

dengan tepat. Seluruh pernyataan tentang fakta maupun opini harus disebutkan sumbernya, 3) Keseimbangan: agar berita seimbang harus diperhatikan tampilan fakta dari masalah pokok, jangan memuat informasi yang tidak relevan. Jangan menyesatkan atau menipu khalayak, jangan memasukkan emosi atau pendapat ke dalam berita tetapi ditulis seakan-akan sebagai fakta, tampilkan semua sudut pandang yang relevan dari masalah yang diberitakan, jangan gunakan pendapat editorial, 4) Kelengkapan dan kejelasan: berita yang lengkap adalah berita yang memuat jawaban atas pertanyaan *who, what, why, when, where*, dan *how*, dan 5) Keringkasan: tulisan harus ringkas namun tetap jelas yaitu memuat semua informasi penting.

Dengan demikian dalam sebuah pemberitaan, persoalan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentunya harus berbasis pada data dan fakta yang objektif. Sehingga pada akhirnya informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya sehingga dapat memupuk kesadaran warga masyarakat dalam menunjang berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 guna mewujudkan Ambon sebagai *Water Front City* dengan memaksimalkan keindahan Teluk Ambon, mendapat liputan media cetak yang cukup luas, sehingga kebijakan tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat. Sejauh ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh generasi muda baik itu pelajar dan mahasiswa untuk membersihkan Teluk Ambon. Salah satu yang paling menonjol adalah Gerakan *Save Ambon Bay for Marine Tourism and Sustainable Fisheries* untuk membersihkan sampah di sepanjang pantai. Gerakan ini mampu dipublikasikan dengan baik oleh Harian Pagi Ambon Ekspres sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang ada di Kota Ambon.
2. Publikasi oleh berbagai media cetak terhadap Program Jumat Pagi Bersama Bersihkan Lingkungan (Jumpa Berlian) yang digulirkan Pemerintah Kota Ambon sejak tahun 2013, telah memberikan dampak yang luas bagi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Program ini berhasil mengantarkan Kota Ambon meraih penghargaan Adipura dari Presiden RI untuk kategori Kota Kecil di Indonesia.
3. Berbagai formulasi kebijakan Pemerintah dalam mendukung Kota Ambon sebagai destinasi wisata mampu dipromosikan oleh media dengan mengusung *tag line* “Ambon bersih di siang hari, terang di malam hari” mampu diapresiasi dengan baik oleh masyarakat Kota Ambon terutama penyediaan listrik oleh PLN Cabang Maluku.
4. Dalam rangka menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku, Harian Pagi Ambon Ekspres bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku meluncurkan program Gerakan Maluku Gemar Membaca. Kegiatan ini di-*launching* langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Anies Baswedan) pada tanggal 26 Januari 2015. Implementasi dari program ini adalah penyediaan halaman khusus di Ambon Ekspres

tentang berbagai informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan serta lomba menulis Cerita Rakyat Maluku dan Lomba Penulisan Artikel bertemakan Potret Pendidikan. Program ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat serta antusias pelajar dan guru untuk menulis di media cetak makin tinggi.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa peran media cetak dalam mengawal kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon sudah dilakukan dengan baik. Jika dilihat dari perspektif komunikasi dan informasi, hal tersebut menunjukkan bahwa media cetak sebagai saluran komunikasi dapat memainkan peran sebagai media yang sangat efektif bagi Pemerintah Kota Ambon dalam menginformasikan berbagai kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat luas dimana media mampu melakukan perubahan sosial bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Schramm (2003) tentang tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam pembangunan yaitu 1) Menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan nasional agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan, dan cara membangkitkan aspirasi nasional dan 2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan pada pimpinan masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas. Hal ini sejalan teori tanggung jawab sosial yang harus

mengedepankan prinsip kebebasan pers tetapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni mencerdaskan publik dan mendukung kebijakan negara yang dianggap baik bagi masyarakat.

Peran Pers sebagai kontrol sosial

Salah satu fungsi yang paling penting dari pers saat ini adalah fungsi kontrol. Operasionalisasi dari pelaksanaan fungsi kontrol ini adalah pers semaksimal mungkin dapat mengambil peran untuk mengawasi, menjaga, dan melakukan penyelidikan terhadap berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Fungsi kontrol atau “*watchdog*” ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers daripada oleh kelompok masyarakat lainnya. Fungsi inilah yang meletakkan pers sebagai salah satu pilar/kekuatan keempat dalam sistem demokrasi. Maksud dari kekuatan keempat yakni pers mampu menandingi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu keberadaan media cetak yang tersebar di Kota Ambon dapat memainkan peran dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap berbagai aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau swasta dalam melakukan pelayanan bagi kepentingan masyarakat luas. Diharapkan dengan memaksimalkan peran fungsi kontrol tersebut, media cetak di Kota Ambon dapat menghasilkan berita-berita yang mampu mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran atau penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta lembaga-lembaga yang terkait. Dari hasil observasi terkait peran pers dalam

melaksanakan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah di Kota Ambon, terdapat beberapa hal yang dapat dideskripsikan yaitu:

1. Kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap kapal ikan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Maluku tidak mendapatkan liputan yang intens oleh media cetak di Maluku. Hal ini berakibat kurang adanya dukungan atau pengawasan masyarakat terhadap persoalan tersebut. Salah satu fakta yang sangat menonjol adalah adanya putusan pengadilan Perikanan Maluku terhadap Kapal MV. Hai Fa yang melakukan pencurian ikan yang hanya didenda Rp. 200.000.000 saja. Padahal pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ini sangat besar yakni melakukan penangkapan ikan tanpa izin serta menangkap ikan yang dilindungi oleh pemerintah. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan dari Menteri Perikanan dan Kelautan.
2. Kritikan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang menempatkan sejumlah politisi untuk mengelola perusahaan daerah (BUMD) tidak mendapat perhatian yang cukup oleh media dalam pemberitaan. Padahal potensi terjadinya pengelolaan yang tidak profesional terhadap asset milik Pemda tersebut sangat besar karena para politisi tersebut dianggap tidak memiliki kecakapan dan kompetensi dalam mengelola perusahaan tersebut.
3. Intensitas liputan terhadap kasus korupsi yang dilakukan aparat dan pejabat pemerintah oleh media cetak di Kota Ambon belum mampu memberikan dampak bagi polisi dan jaksa untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

4. Beberapa narasumber yang dijadikan rujukan oleh media cetak di Kota Ambon tidak memiliki kompetensi dalam membedah persoalan yang dijadikan sebagai objek pemberitaan. Sehingga pesan-pesan yang berisi ide/gagasan dari narasumber tersebut bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya.
5. Masih rendahnya kemampuan wartawan dalam melakukan jurnalis investigasi padahal banyak sekali kasus yang harus didalami untuk mendapatkan data dan fakta yang akurat sebagai dasar dalam melakukan pemberitaan. Salah satu yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus penyalahgunaan anggaran Jamkesmas di salah satu RSUD di Kota Ambon. Perbedaan data tentang kerugian negara sebagai akibat kasus tersebut yang dimiliki oleh pemerintah daerah, polisi, dan jaksa menyebabkan kasus tersebut terkadang dianggap direayasa oleh pihak tertentu.

Paparan di atas menunjukkan bahwa fungsi kontrol media cetak yang dilakukan oleh pers di Kota Ambon dalam melakukan pemberitaan tentang masalah-masalah yang berkaitan kebijakan pemerintah terlihat belum maksimal, misalnya dalam melakukan peliputan yang berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik khususnya di Kota Ambon. Ini berarti bahwa selama ini media cetak di Kota Ambon masih terbatas hanya melakukan fungsi informasi, sedangkan sebagai kontrol sosial belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut sangat relevan bila dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan salah satu informan dimana menurutnya berbagai aktivitas pemberitaan oleh beberapa media cetak

selalu memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Persoalannya adalah selama ini peran media cetak belum mampu memberikan pengaruh bagi lembaga publik tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang telah diambil, misalnya dalam hal pengungkapan kasus korupsi. Media hanya mampu menginformasikan kepada publik lewat pemberitaannya saja, sedangkan pengambilan keputusan tentang masalah tersebut lebih banyak dieksekusi institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ironisnya, apabila masalah-masalah tersebut diekspos secara berlebihan di media, justru hal tersebut melahirkan berbagai polemik di masyarakat, dan bahkan media dianggap melakukan *judgement* yang berlebihan (*trial by the press*).

Gambaran tersebut semakin menunjukkan bahwa dalam lingkungan komunikasi publik, keberadaan kekuatan-kekuatan di luar media dapat mempengaruhi produk media. Dari pendekatan teori libertarian, menunjukkan bahwa media belum maksimal dalam menggunakan kebebasannya karena dipengaruhi oleh berbagai kekuatan lainnya. Oleh karena itu, media harus betul-betul mengedepankan hak-hak publik untuk tahu dan tanggung jawab pers sebagaimana tuntutan publik di Indonesia yang makin terbuka seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam ketentuannya memberikan dasar bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

PENUTUP

Bertolak dari paparan hasil dan pembahasan yang diuraikan maka dirumuskan atau diajukan beberapa kesimpulan antara lain peran media cetak dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan dengan baik, sehingga memberikan dampak terhadap perubahan sosial dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Namun dalam pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kontrol terlihat bahwa pers belum mampu secara maksimal dalam melakukan peliputan yang berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan khususnya oleh lembaga-lembaga publik. Itu berarti bahwa selama ini pers masih terbatas hanya melakukan fungsi informasi saja tanpa ditindaklanjuti dengan tindakan investigasi. Selain itu, selama ini dalam melakukan pemberitaan, pers belum dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap lembaga-lembaga publik dalam pengambilan keputusan terkait dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara institusi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain dalam melakukan proses peliputan di lapangan sampai dengan percetakan, para wartawan harus selalu konsisten dengan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Perlu pula pengembangan kualitas sumber daya pekerja pers dalam melaksanakan prinsip-prinsip jurnalisme investigasi guna menunjang mereka dalam melakukan penyelidikan berkaitan dengan kasus-kasus atau pelanggaran yang dilakukan lembaga-lembaga publik, serta hendaknya pers lebih intens melakukan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai institusi yang berkaitan

langsung dengan proses penegakan hukum, sehingga berbagai upaya ke arah tercapainya pemenuhan layanan publik bagi masyarakat dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. *Opini publik*. Jakarta: Gramata, 2010.
- Atmakusumah. *Mengangkat masalah lingkungan ke media massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Cangara. *Komunikasi politik: Konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- . *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ecip, Sinansari. *Jurnalisme Mutakhir*. Jakarta: Republika, 2007.
- Kusumaningrat. *Jurnalistik, teori, dan praktek*. Bandung: Rosda, 2007.
- Nimmo. *Komunikasi politik 'komunikator' pesan dan media*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nurudin. *Hubungan media: Konsep dan teori*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rivers, Wiliam L. *Etika media massa dan kecenderungan untuk melanggarnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Robert, K. *Study kasus: Desain dan penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Vardiyansah. *Pengantar ilmu komunikasi*. Bogor: Ghalia Indoensia, 2004.
- Werner, J. S., dan James J. Tankard. *Teori komunikasi: Sejarah metode dan terpaan di media massa*. Jakarta: Preneda Media, 2005.
- Winarno, Budi. *Sistem politik Indonesia era reformasi*. Jakarta: PT Buku Kita, 2008.